BAB II

ARAH BARU KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DI BAWAH DONALD TRUMP

Dalam bab II ini, penulis akan fokus menjelaskan mengenai bagaimana arah baru kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan presiden Donald Trump, yang dilihat dari kebijakan proritas yang dibuat. Terdapat empat fokus dalam bab ini yaitu dasar politik luar negeri AS, Pergeseran kebijakan luar negeri AS dari era Obama ke era Trump, Kebijakan politik luar negeri Donald Trump dan kritik Donald Trump terhadap Obama. Dinamika politik luar negeri suatu negara tidak dapat dipisahkan dari aktor-aktor yang berperan penting dalam setiap pengambilan keputusan terhadap kebijakan yang dibuat untuk politik luar negeri Donald Trump. Terdapat aktor negara dan aktor non negara yang berperan dominan terhadap suatu politik luar negeri Amerika Serikat. Dalam setiap isu yang sedang dihadapi Amerika, aktor-aktor yang berperan didalamnya tentu saja berbeda-beda.

Pada isu-isu politik aktor negara sangat berperan penting dalam setiap kebijakan luar negeri yang dibuat, sedangkan untuk isu ekonomi terdapat aktor non negara yang juga berperan didalamnya. Dimana aktor – aktor tersebutlah yang berperan menjadi penentu setiap kebijakan luar negeri yang dibuat oleh suatu negara. Pemimpin negara yang sebelumnya dalam negara itu juga berperan mempengaruhi perubahan sebuah kebijakan selanjutnya yang akan dibuat. Untuk melihat bagaimana hubungan antara isu dan peran aktor dalam politik luar negeri Donald Trump, termasuk memahami

terlebih dahulu dasar politik luar negeri Amerika Serikat berikut ini.

A. Dasar Politik Luar Negeri Amerika Serikat

Dalam sistem internasional, adanya interaksi yang tercipta di antara negara yang satu dengan negara yang lainnya pada umumnya didasari oleh adanya kepentingan - kepentinga yang dimiliki oleh masing - masing negara untuk dicapai. Masing-masing negara dalam dunia internasional memberikan respon atas setiap situasi internasional yang sedang terjadi. Dalam hal ini Amerika Serikat telah memiliki pandangan, cara, dan konsep terhadap politik internasionalnya. Pada dasarnya politik luar negeri Amerika Serikat membentuk pola antara intervensionis dan isolasionis. Sebelumnya terlebih dahulu kita pahami apa itu Isolasionis dan Intervensionis. Isolasionis merupakan suatu bentuk kecenderungan dalam arah politik luar negeri (khususnya arah politik luar negeri Amerika Serikat) yang cenderung menutup diri dari kerjasama dengan negara lain, yang dikenal juga dengan sebutan Unilateralisme. Contohnya Amerika Serikat pada waktu sebelum Perang Dunia II. Isolasionis telah mengajarkan Amerika Serikat untuk memperhatikan perkembangan dan tenaga konsepsinya sendiri terkait kemerdekaan dan kemajuan, kemudian pembangunan sosial dan ekonomi yang bermanfaat. Intervensionisme di dalam KBBI adalah campur tangan atas urusan dalam negeri negara lain. Amerika Serikat pada dasarnya memang cenderung melakukan intervensionisme terhadap negara lain untuk mencapai kepentingannya.

Dewan Keamanan Nasinoal Amerika Serikat, Samuel Bergr mengatakan bahwa setelah Perang Dingin selesai Amerika Serikat menununjukkan usaha ingin menguasai dunia, hal-hal yang mendorong sikap Amerika Serikat tersebut adalah :

1. Kekalahan Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin menyebabkan Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara adidaya yang tersisa. Tidak ada lagi negara yang mampu mengimbangi kejayaan dan kekuasaan Amerika Serikat kala itu sehingga niat untuk menguasai dunia tidak ada yang menghalangi.
2. Kekuatan Ekonomi Amerika Serikat mengungguli Uni Eropa dan Jepang. Ada asumsi bahwa globalisasi ekonomi menyebabkan semakin meningkat ketergantungan antara negara-negara di dunia. Namun asumsi tersebut tidak selamanya benar karena negara-negara berkembang lebih bergantung pada negara maju.
3. Kemampuan militer yang dimiliki Amerika Serikat merupakan kekuatan militer terbesar di dunia yan menjadi tolok ukur bagi negara lain juda di dunia karena cenderung mengalami kemajuan yang signifikan. Politik internasional lebih fokus ke arah militerisme selama perang dingin, dimana kemampuan militer menjadi pengaruh utama hubungan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Setelah perang berakhir, sebagian besar negara yang terlibat konflik sudah mengurangi anggaran militernya. Namun Amerika Serikat tetap mempertahankan anggaran militernya seperti anggaran pada Perang Dunia.

Ciri utama politik luar negeri Amerika Serikat sejak tahun 1940-an hingga kini dibentuk oleh asumsi dasar pemikiran realis politik dan idealisme politik. Realisme politik muncul dan berkembang pada masa Perang Dingin, dimana tujuan utama politik luar negeri Amerika Serikat adalah untuk melakukan pembendungan politik terhadap Uni Soviet sebagai bentuk perlindungan supremasi kekuasaan Amerika Serikat dalam kancah internasional. Sedangkan idealisme politik muncul dan berkembang seiring dengan hancurnya Uni Soviet setelah perang dingin, kemudian yang menjadi tujuan utama politiknya saat itu antara lain melakukan ekspansi kebebasan atau menyebarkan ideologi demokrasi ke seluruh penjuru dunia.

Amerika Serikat mempunyai empat kerangka kerja utama dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Kerangka kerja politik luar negeri tersebut meliputi power, peace, prosperity, dan principle (4P) (Ikenberry, 2007) :

1. *Power* (kekuasaan), merupakan suatu kunci dalam merumuskan dasar tujuan Amerika menguasai dunia, pertahanan diri, dan pemeliharaan kemerdekaan serta teritorial nasional. *Power* dibutuhkan untuk menegah terjadinya serangan dan menyebarkan pengaruh terhadap negara lain. *Power* merupakan kunci utama dalam memelihara pertahanan yang kuat dan pencegahan yang kredibel. *Power* memungkinkan aktor untuk menciptakan sesuai dengan refleksi kepentingannya.

2. *Peace* (perdamaian), secara filosofis dapat dilihat sebagai tujuan dalam menjawab pertanyaan untuk apa *power* diamankan. Pada prinsipnya, Amerika memposisikan diri sebagai penjaga keamanan dunia. Hal ini dilatarbelakangi oleh perjalanan sejarah dan prinsip-prinsip dasar yang dipegang kuat oleh Amerika. Untuk mewujudkan *peace*, Amerika tidak segan-segan untuk menyuarakan perang. Dalam politik luar negeri Amerika, hal ini lebih dikenal dengan istilah "perang untuk mengakhiri perang".

3. *Prosperity* (kemakmuran), politik luar negeri Amerika, utamanya dimotifasi oleh keinginan untuk mencapai dan mempertahankan kemakmuran. Dalam hal ini, terdapat beberapa kepentingan ekonomi dalam politik luar negeri Amerika, seperti contohnya kebijakan untuk membantu menurunkan tarif impor dalam hubungan dagangnya dengan negara lain, menciptakan pertumbuhan pasar untuk produk-produk ekspor Amerika, penanaman investasi luar negeri yang menguntungkan bagi Amerika, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik, dan lain-lain. *Prosperity* juga dapat dicapai dengan dengan penguatan berbagai kerjasama yang berbasis keuntungan ekonomi akan menciptakan kemakmuran bagi warga AS (Ambardini, 2011).

4. *Priciples* (prinsip), meliputi nilai, idealisme, dan kepercayaan. Dalam prinsip ini, Politik Luar Negeri Amerika Serikat adalah menyebarkan dan menanamkan prinsip-prinsipnya ke seluruh penjuru dunia. Prinsip yang dimaksudkan dalam hal ini ialah nilai-nilai yang dianut oleh Amerika

Serikat sendiri. Nilai-nilai itu tidak lain adalah demokrasi yang selalu disebarkan oleh Amerika Serikat ke seluruh dunia. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai target - target dalam memenuhi kepentingannya di wilayah-wilayah yang telah ditargetkan.

Keempat prinsip tersebut menjadi pedoman sekaligus dasar bagi pemimpin Amerika Serikat dalam menjalankan politik luar negeri. Walaupun setiap pemimpin memiliki kebijakan yang berbeda-beda namun tetap tidak akan lepas dari keempat prinsip di atas. Secara umum arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat harus tetap menjaga posisi *primacy* Amerika Serikat. Terdapat dua pilar utama dalam konteks politik internasional AS yang dijadikan pokok negara super power tersebut yaitu politik dan liberalisme ekonomi dunia. Dalam bidang politik berasal dari ideologi kapitalisme yang sudah dibuat dan diinternasionalisasikan.

B. Pergeseran Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dari Era Obama ke Era Donald Trump

Sebelum Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat, Barack Obama terlebih dahulu memimpin Amerika Serikat. Barack Obama merupakan presiden yang berasal dari partai politik Demokrat, dimana partai tersebut cenderung pro-bisnis dan mendukung pasar bebas (Cipto B. , 2003). Politik luar negeri Amerika Serikat pada era Barack Obama lebih fokus terhadap isu-isu multilateralisme dalam menjalin hubungan luar negeri AS dengan negara-negara lainnya di dunia. Untuk menjaga dan

mengamankan kepentingan Amerika Serikat di wilayah-wilayah tertentu, Obama lebih menekankan pada kerjasama bilateral maupun multilateral serta mengedepankan diplomasi. Obama lebih mengedepankan dalam membangun aliansi, persekutuan, dan institusi yang dibutuhkan untuk mengatasi ancaman serta memperketat keamanan. Terkait permasalahan aliansi Amerika Serikat membutuhkan kerjasama yang stabil atau konstan, efektif dan relevan (Luthfi R. F., 2018). Sebagai contoh yaitu NATO telah mengambil langkah besar dengan melakukan transformasi dirinya sendiri dari yang awalnya sebagai struktur keamanan pada era Perang Dingin menjadi sebuah persekutuan yang bergerak dan memperjuangkan perdamaian. Amerika Serikat juga memperkuat hubungannya dengan negara-negara lain di dunia seperti contohnya negara di Asia. Obama terkenal sebagai pemimpin negara yang lebih mengedepankan soft power daripada menggunakan hard power dimana negosiasi lebih dikedepankan dalam menyelesaikan permasalahan apapun, ia sendiri mengakui bahwa sebelumnya Amerika Serikat telah menggunakan negosiasi yang sangat terbatas dalam penyelesaian permasalahan.

Pada masa pemerintahan Obama, Amerika Serikat menyatakan lebih terbuka, ia mengizinkan negara-negara lain untuk berkontribusi kepada Amerika Serikat dalam perwujudan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Multilateral lebih dikedepankan, bergabung dengan institusi-institusi internasional dioptimalkan untuk mengatur hubungan antara negara satu dengan yang lain dalam penyelesaian berbagai permasalahan. Obama sendiri telah

mendirikan berbagai organisasi regional yang memiliki tujuan untuk merekatkan hubungan antar kawasan dengan negara lain, maupun organisasi-organisasi yang kepentingannya yang sama dengan Amerika Serikat. Selain itu pula, Obama juga lebih terbuka terhadap negara – negara Islam, untuk mengembalikan kepercayaan dunia Islam kepada AS, ia melakukan kunjungannya ke beberapa negara di Timur Tengah. Pada pemerintahan Obama, Amerika Serikat melakukan upaya kerjasama di berbagai bidang dalam menjalin hubungan luar negerinya dengan negara-negara lain untuk memperbaiki citra buruk Amerika Serikat di mata dunia, dengan menujukkan kembali citra Amerika Serikat sebagai penjunjung tinggi HAM dan Demokrasi.

Selain itu Amerika Serikat pada masa pemerintahan Obama juga menjunjung tinggi nilai kebebasan. Terutama kebebasan individu, dimana kebebasan individu merupakan hak-hak yang dimiliki manusia dalam diri sejak lahir dan tidak dapat diambil alih oleh siapapun, penerapannya bersifat universal yang tidak memandang ras, gender, atau status apapun. Sebagai negara Liberal, AS mempromosikan standar moral universal dengan mengedepankan pada kebebasan individu. Kebijakan luar negeri AS pada masa Barack Obama berbeda dengan Kebijakan luar negeri pada era Trump selaku presiden AS setelah Obama. Gaya politik luar negeri Donald Trump dalam hal politik ini sangat berbeda dengan presiden pendahulunya, Barack Obama. Adanya berbagai pertemuan atau kunjungan ke beberapa negara di dunia dengan tujuan ekonomi sebagai fokus utama dalam pemerintahan Donald Trump. Donald Trump sebagai

seorang pengusaha dalam membuat setiap kebijakan luar negerinya selalu berorientasi pada keuntungan sebanyak mungkin sebagai upayanya untuk mewujudkan kampanyenya "*Make America Great Again*".

Jika pada era Obama Amerika lebih terbuka dan menjalin berbagai kerjasama internasional baik bilateral maupun multilateral, berbanding terbalik dengan era Pemerintahan Trump yang justru lebih tertutup. Secara langsung arah politik luar negeri Trump merupakan bentuk anti-hegemoni dan antimultilateralisme yang telah dibangun AS sebelumnya. Trump melihat bahwa hegemoni Amerika kini kurang dapat memberikan manfaat bagi Amerika. Trump berpikir bahwa hegemoni tersebut telah membatasi gerakan dan langkah Amerika untuk berkembang menjadi bangsa yang otonom dan dominan (Nichols, 2016). Sehingga Trump lebih memilih untuk keluar dan berhenti dari beberapa kerjasama multilateral yang telah dibangun oleh Amerika Serikat selama ini. Selain itu Trump juga lebih tertutup terhadap negara – negara Islam sesuai janjinya saat kampanye untuk tidak hanya membatasi,bahkan melarang masuknya imigran yang berasal dari beberapa negara Islam yang diduga menjadi asal terorisme. Hal ini berbanding terbalik pada era Obama yang justru berusaha memperbaiki hubungan dan terbuka dengan negara – negara Islam untuk memperkuat aliansinya.

Dalam kampanye pemilihan presiden Donald Trump telah membuat menyuarakan berbagai kebijakan yang kontroversial dan bertentangan dari presiden pendahulunya Barack Obama. Adapun

beberapa fokus janji kampanye Donald Trump pada saat itu adalah penurunan tarif pajak bisnis, potongan pajak yang diberikan untuk semua orang, pembangunan tembok besar sebagai pembatas antara Meksiko dengan Amerika Serikat, serta adanya larangan masuk bagi orang-orang yang berasal dari negara - negara yang diduga terlibat dengan terorisme. Dilihat dari kebijakan-kebijakan tersebut, Trump ingin menerapkan politik *isolasionisme* untuk melindungi Amerika Serikat dari ancaman dunia luar dan fokus terhadap masalah dalam negerinya. Donald Trump juga membuat kebijakan luar negeri yang bertentangan dengan Barack Obama yaitu dalam hal kesehatan, Trump ingin membatalkan *Obamacare*. *Obamacare* merupakan undang-undang yang berisi tentang kebijakan untuk memberikan asuransi kesehatan bagi warga Amerika Serikat yang tidak mampu serta untuk memperbaiki hasil layanan kesehatan dan menyederhanakan penyaluran layanan kesehatan. Selain dalam hal kesehatan, dalam hal ekonomi Trump telah membuat keputusan untuk melakukan penarikan Amerika Serikat dari negosiasi TPP dimana hal tersebut jelas bertentangan dengan kebijakan Presiden Obama. Penarikan Amerika Serikat ini sebagai bukti nyata dari komitmen yang Trump katakan saat kampanye untuk menciptakan kesepakatan perdagangan yang lebih adil dan memberikan keuntungan bagi Amerika Serikat.

Kebijakan luar negeri Trump dengan pengaruh isolasionis dan proteksionis ini sangat menekankan pentingnya cara pandang yang transaksional, yang lebih berorientasi pada keuntungan keuntungan finansial dan moneter bagi Amerika sebagai prioritas tertinggi dibandingkan dengan modal politik maupun

keamanan (Sam Ellis , dkk, 2016). Kepemimpinan Donald Trump menanggalkan seluruh tradisi Politik Global Amerika di masa kepemimpinan Barac Obama. Hal tersebut terlihat jelas dengan beberapa kebijakan baru yang cukup kontroversi oleh Presiden Trump. Perubahan perkembangan Politik Global Amerika sangat terasa setelah Donald Trump menjabat sebagai Presiden dengan keputusan-keputusan yang dipandang cukup berani.

C. Kebijakan Politik Luar Negeri AS Era Donald Trump

Politik luar negeri Amerika Serikat dalam bidang politik merupakan sebuah langkah yang dilakukan Amerika untuk mempertahankan citranya di mata dunia internasional serta mencapai kepentingan yang telah ditargetkan. Politik merupakan *struggle of power*, dimana untuk mendapat pengaruh yang kuat di mata dunia internasional dibutuhkan kekuatan melalui kebijakan - kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara. Oleh karena itu sebuah *power* benar - benar diperjuangkan untuk didapatkan. Bentuk-bentuk politik luar negeri Amerika Serikat dalam bidang politik umumnya diantaranya memberikan bantuan-bantuan luar negeri untuk negara-negara yang membutuhkan, melakukan kunjungan ke luar negeri yang merupakan bagian dari *soft diplomacy*, bergabung dengan organisasi dan institusi internasional, serta masih banyak cara lagi yang lainnya. Dibalik setiap kebijakan luar negeri yang telah diputuskan, ada beberapa kepentingan yang menjadi tujuan utama Amerika Serikat untuk mendapatkan keuntungan sehingga

mampu meraih kemakmuran dan pujian dari rakyat Amerika Serikat itu sendiri (Luthfi R. F., 2018).

Perubahan kebijakan luar negeri oleh Trump yang banyak dianggap radikal pada kenyataannya merupakan suatu pengembalian dari kebijakan luar negeri konvensional yang telah dipraktikkan AS selama sebagian besar sejarahnya dan menajadi dasar politik luar negeri AS. Sebaliknya, kebijakan luar negeri Presiden Clinton, Bush, dan Obama sebenarnya keluar dari isolasionisme dan netralitas yang menjadi ciri khas sebagian besar sejarah Amerika Serikat (Paterson, 2018). Pada masa pemerintahan Donald Trump, politik luar negeri Amerika Serikat tentunya tidak dapat dipisahkan dari keuntungan ekonomi yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat sendiri. Donald Trump tidak ingin melakukan kerjasama dengan sebuah negara atau organisasi jika Amerika Serikat tidak mendapatkan keuntungan yang besar dari kerjasama yang dilakukannya tersebut. Dalam politik luar negeri di bidang politik, aktor yang berperan penting dalam pembuatan keputusan adalah presiden dan juga kongres. Aktor lain seperti Dewan Keamanan Nasional, Departemen Luar Negeri, CIA, Kantor Perwakilan Dagang AS adalah sebagai aktor pendorong yang membantu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Presiden Donald Trump dalam kaitannya dengan pengambilan kebijakan luar negerinya.

Trump banyak melakukan pertemuan sebagai cara untuk menciptakan perundingan dengan negara-negara, baik itu antara Amerika Serikat dengan satu negara maupun menyelenggarakan perundingan dalam sebuah pertemuan besar dengan banyak negara. Perundingan yang dilakukan Trump tersebut dilakukan

agar tercapainya suatu kesepakatan yang mayoritasnya pada bidang kerjasama perdagangan. Seperti pada pertemuan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan negara - negara yang tergabung dalam Konverensi Tinggat Tinggi G7 yang beranggotakan Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat sendiri. Pertemuan G7 tersebut dilaksanakan di Kanada pada tanggal 8-9 Juni 2018. Pertemuan tersebut dilakukan oleh Donald Trump sebagai cara untuk mencapai kepentingan Amerika Serikat dan menyebarkan pengaruhnya di dunia.

Setelah Amerika Serikat melakukan Konverensi Tingkat Tinggi G7 di Kanada, Trump mengatakan adanya perdagangan bebas dengan menghilangkan hambatan berupa penghapusan tarif dan subsidi. Ia menyampaikan bahwa Amerika Serikat telah menjadi korban dari perdagangan yang tidak adil, dan ia tidak akan membiarkan hal tersebut terus terjadi. Presiden Trump telah melakukan negosiasi-negosiasi dengan negara anggota tentang perdagangan yang haeus adil karena adanya timbal balik. (TheWhiteHouse, Press Conference by President Trump After G7 Summit, 2018). Bukan hanya isu ekonomi yang dibahas dalam pertemuan tersebut, isu lainnya yang dibahas ialah masalah migrasi yang tidak terkendali dan adanya ancaman bagi keamanan nasional, serta warga negara dan kualitas mereka (*ibid*). Hal tersebut sejalan dengan tujuan negara Amerika Serikat untuk meminimalisir adanya imigran yang masuk sehingga dapat tercipta keamanan nasional di Amerika Serikat yang lebih kondusif.

Trump telah menekankan postur kebijakan luar negeri yang menurutnya ideal dan adil bagi Amerika Serikat, sesuai dengan slogan kampanyenya yang bertujuan untuk membuat Amerika kembali disegani di kancah politik internasional. Kemudian langkah yang ditempuh dengan mengaplikasikan "*America First*" dalam kebijakan luar negerinya (Beckwith, 2016). "*America First*" yang dimaksudkan oleh Trump adalah memprioritaskan warga Amerika Serikat dan keamanannya terkait dengan kebijakan luar negeri. Ia mengatakan bahwa warga Amerika Serikat menjadi prioritas dalam setiap keputusan kebijakan luar negeri ketika menjabat Presiden AS nanti, hal tersebut telah diucapkannya sejak masa kampanyenya (Milbank, 2016). "*American First*" menjadi tema utama dalam pemerintahan Trump (Diamond, Jeremy & Collinson, Stephen, 2016).

Slogan "*Make America Great Again*" memperlihatkan keyakinan Trump atas keunggulan dan bangkitnya Amerika (*American primacy*). Menurut Trump, kepentingan nasional Amerika menjadi yang paling utama karena diplomasi merupakan *zero sum game*, dimana hanya ada satu pemenang dan satu pecundang. Trump meyakini bahwa Amerika harus dan akan segera kembali mendapatkan penghormatan yang semestinya dari dunia internasional, dengan cara menunjukan dominasi total atas di duna internasional. Untuk kembali menjadi negara yang mampu mendominasi, Amerika memfokuskan diri untuk membangun kekuatan dalam negeri dengan mengutamakan kepentingan nasional dan kemampuan negara untuk berperilaku tanpa pembatasan dari aliansi maupun aturan internasional (Beckwith, 2016).

Dalam beberapa hal, Trump sudah mulai realistis dan tidak memberlakukan kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai dasar demokrasi Amerika. Kebijakan seperti mendiskriminasi imigran muslim yang ada di AS serta larangan masuknya imigran muslim dari negara yang diduga memiliki jaringan terorisme sudah tidak ada dari web yang berisi program resmi Trump. Meskipun demikian, larangan masuknya imigran muslim tersebut tetap terdengar tajam kaitannya dengan kebijakan proteksionisme Trump yang baru meskipun tidak secara terang - terangan ditampilkan. Secara umum, perubahan yang terjadi pada politik luar negeri AS tertuju pada prioritas bukan nilai - nilai dasarnya. AS tidak akan meninggalkan prinsip dalam perdagangan bebas, namun melakukan renegosiasi dalam pelaksanaannya (Hara, 2016).

D. Kritik Donald Trump terhadap Barack Obama

Donald Trump mengkritik bahwa politik luar negeri AS pada era kepemimpinan presiden Barack Obama sebagai tindakan yang mengacaukan politik dunia. Menurut Trump, Kebijakan Obama di Suriah, Irak, dan Libya untuk “mengubah rezim” yang mengakibatkan kekacauan di Timur Tengah telah memicu kebangkitan kelompok ekstremis *Islamic State Iraq and Syria* atau Negara Islam Irak Suriah (ISIS/NIIS). Kondisi yang demikian membuat ISIS untuk berkembang. Meskipun tidak mengatakan secara jelas bagaimana cara yang akan ditempuhnya, Trump telah merencanakan akan menyerang ISIS. Trump mengatakan bahwa militer Amerika hanya akan dikerahkan ketika dalam keadaan terdesak dan sangat diperlukan, dilakukan ketika Amerika sudah yakin

merencanakan meraih kemenangan dalam perang tersebut. Trump berjanji akan memperbaiki militer AS dengan berkomitmen terhadap perdamaian, dan menghimbau negara-negara sekutu untuk lebih berkontribusi pada organisasi seperti NATO (Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara), memperbaiki hubungan AS dengan Israel dan beberapa negara di kawasan Asia. Trump akan memandang dunia internasional berdasarkan kepentingan Amerika Serikat (Widiadi, 2016).

Selain memperkuat kembali kekuatan militer, mengembalikan kebebasan sistem finansial negara juga akan selalu ditekankan oleh Trump dengan tujuan memperbaiki permasalahan politik di AS. Trump juga telah mengoreksi terkait restrukturisasi pengeluaran dalam sektor militer tentang kontribusi AS dalam perlindungan Eropa melalui *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) (Nur Rachmat Yuliantoro, 2017). NATO merupakan sebuah organisasi internasional sebagai pakta pertahanan yang paling efektif setelah selesainya Perang Dingin yang ketika itu mempunyai tujuan untuk meredam kekuatan Uni Soviet (Rusia). Di dalam pakta pertahanan tersebut Amerika Serikat menjadi kontributor dana langsung terbesar senilai sekitar 22% dari keseluruhan total pendanaan (Klesser, 2016). Trump mengatakan pembahasan baru akan segera dilakukan bersama dengan para sekutu AS di NATO untuk menekankan kembali struktur organisasi serta penyeimbangan dana. Menurut Trump, anggota NATO yang lain harus turut berkontribusi dalam pendanaan NATO atau AS mengancam tidak akan membantu mereka ketika terjadi serangan dari luar. Penyebaran penggunan

senjata nuklir untuk alasan apapun juga telah dilarang apalagi jika disalahgunakan untuk terorisme (Kleiner, 2016).

Kritikan lainnya Trump terhadap Obama berkaitan dengan kebijakan luar negeri Obama terhadap negara Cina dan Rusia. Ia berpendapat bahwa Obama telah membiarkan Cina mengambil keuntungan yang banyak dari kerjasamanya dengan Amerika Serikat. Menilai ada banyak kekeliruan yang dilakukan oleh Obama pada politik luar negeri AS, ia berjanji untuk memperbaiki berbagai kebijakan luar negeri Amerika (Brunnstrom, 2016). Mengenai isu imigrasi yang tentunya berkaitan dengan keamanan nasional, masuknya imigran ilegal dari negara tetangga ke Amerika seperti Meksiko, sering kali meresahkan bahkan menimbulkan permasalahan sosial bahkan ancaman keamanan. Kebijakan pemerintahan Obama terkait penerimaan 12.000 pengungsi dari Suriah pada tahun 2015 dikritik pedas oleh Trump sebagai tindakan yang gegabah karena pemeriksaannya yang kurang kritis seperti pemeriksaan latar belakang oleh pemerintah sehingga dapat menimbulkan masalah kriminal dan mengancam keamanan nasional AS. Pada pemerintahan Trump ini, ia mengupayakan tindakan untuk meningkatkan jumlah imigran yang dideportasi serta melakukan pemeriksaan yang lebih kritis bagi imigran yang ingin tinggal di Amerika Serikat (NPR, 2016).